PENGUKURAN KINERJA BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Prodi S1 Akuntansi Syariah

DI SUSUN OLEH :

AMINI

3418075

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

KOTA BUKITTIGGI

2022

Abstrak

Amini, NIM 3418075 (2018), judul skripsi : **" Pengaruh Kinerja Belanja Daerah Kota Bukittinggi Daerah Dengan Menggunakan Metode *Value For Money*"**. Jurusan Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan anggaran dan perealisasian anggaran belanja daerah serta anggaran dan perealisasian anggaran mengalami kenaikan dan penurunan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tingkat ekonomis penggunaan dana anggaran belanja daerah, untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah, dan mengetahui seberapa efektif dalam menggunakan dana anggaran belanja daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menganalisis serta menjabarkan tentang pengukuran kinerja belanja daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dalam skala numerik. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang berasal dari Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan pengukuran kinerja belanja daerah Kota Bukittinggi dengan menggunakan metode *value for money*. Bahwa belanja daerah Kota Bukittinggi sudah dilakukan dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Nilai ekonomis, efisien dan efektivitas dari tahun 2017 sampai tahun 2021 masih mengalami kenaikan dan penurunan. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 nilai efektif dan ekonomis dari belanja tidak terduga dinyatakan 0,00%. Hal ini dikarenakan pada masa itu pemerintah tidak menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga tersebut. Untuk tingkat efektivitas belanja daerah Kota Bukittinggi sudah baik. Pada tahun 2021 nilai efektivitasnya lebih tinggi yang berarti pada tahun tersebut paling efektif di antara tahun 2017 sampai 2021.

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Belanja Daerah dan *Value For Money*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamiin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul **"Pengukuran Kinerja Belanja Daerah Kota Bukittinggi Dengan Menggunakan Metode *Value For Money*"**. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benarang seperti sekarang ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikan bantuan baik berupa sarana, pemikiran, motovasi, materi dan doa.

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor UIN Sjech M.Jamil Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama melanjutkan pendidikan di UIN SMDD Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
3. Ibu **Nini Sumarni, SE. M.,Si** selaku Ketua Jurusan S1 di Akuntansi Syariah UIN SMDD Bukttinggi.
4. Ibuk **Nini Sumarni, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.

5. Ibuk **Nini Sumarni, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dan ilmu pengentahuan serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Binsnis Islam UIN SMDD Bukittinggi yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati UIN SMDD Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu pegawai Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian dan juga telah membimbing dalam melakukan penelitian.
9. Para sahabat- sahabat kelas AK B angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat, motivasi dan menemani penulis bersama-sama menimba ilmu selama perkuliahan.
10. Kepada teman **Yuni Kartika** sudah membantu dalam segala hal dalam memberi semangat, motivasi dan menemani penulis dalam segala proses pembuatan skripsi.

Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta saya Ayah **Ardi** dan Ibu **Mardanis**, tempat saya mengadu segala rasa, yang telah memberikan motivasi yang dibarengi dengan kasih sayang, materi dan doa yang tiada hentinya, yang membuat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya terimakasih kepada

saudara saudari saya **Ilhami** yang telah memberikan saya doa dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan mengajukan pertanyaan kapan wisudanya dan juga pengalaman hidup perjuangan membantu orang tua berjualan dan di rumah selama masa- masa sekolah maupun waktu libur.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah lah kita berserah diri, yang Maha luas ilmu-Nya dan Maha Bijaksana.

Bukittinggi, 02 November 2022

Penulis

AMINI
3418075

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR BAGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 10

D. Rumusan Masalah 10

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

F. Ruang Lingkup Penelitian 11

G. Penjelasan Judul 12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori 14

1. Kinerja 14

2. Pengukuran Kinerja 17

3. *Value For Money* 22

4. Pengukuran *Value For Money* 25

5. Keuangan Daerah 28

6. Anggaran Sektor Publik 30

7. Belanja Daerah 32

8. Laporan Keuangan Daerah 36

9. Laporan Realisasi Anggaran 40

10. Landasan Syariah 43

B. Kajian Terdahulu 44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 48

B. Lokasi Penelitian 48

C. Jenis dan Sumber Data····· 49
D. Informan Penelitian····· 49
E. Teknik Pengumpulan Data····· 49
F. Metode Analisis Data····· 50
BAB IV PEMBAHASAN
A. Profil Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi····· 53
1. Sejarah Instansi····· 53
2. Lokasi Instansi····· 54
3. Visi Misi····· 54
4. Tujuan····· 55
5. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi 56
6. Kebijakan····· 58
7. Struktur Kerja Industri Mitra····· 58
B. Pembahasan
1. Perhitungan Tingkat Ekonomis Belanja Daerah Kota Bukittinggi 60
2. Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Kota Bukittinggi 64
3. Perhitungan Tingkat Efektivitas Belanja Daerah Kota Bukittinggi····· 68
4. Hasil Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Daerah Kota Bukittinggi Menggunakan Metode *Value For Money*..... 72
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 76
B. Saran..... 77
DAFTAR PUSTAKA..... 78
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah..... 6

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu..... 45

Tabel 4.1 Tabel Ekonomis Belanja Daerah Kota Bukittinggi..... 61

Tabel 4.2 Tabel Efisiensi Belanja Daerah Kota Bukittinggi..... 65

Tabel 4.3 Tabel Efektivitas Belanja Daerah Kota Bukittinggi..... 69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Ekonomis Total Belanja Daerah Kota Bukittinggi..... 63

Grafik 4.2 Grafik Efisiensi Total Belanja Daerah Kota Bukittinggi..... 67

Grafik 4.3 Grafik Efektivitas Total Belanja Daerah Kota Bukittinggi..... 71

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Susunan Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi..... 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini organisasi sektor publik berkembang sangat pesat, baik pada tingkat pusat (nasional) maupun daerah. Sehingga, hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi dari berbagai pihak baik dari pihak internal (organisasi) maupun pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat serta pemberi donasi. Dinamika perkembangan lingkungan organisasi baik dari segi internal maupun eksternal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan organsiasi tersebut dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan proses dalam manajemen kinerja yang dimulai dari merencanakan kinerja hingga mengevaluasi kinerja. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisiensi, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tijgkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja juga dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria

keberhasilan ini yaitu berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang menjadi target dari individu atau kelompok tersebut. [1]

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis yang dapat memajukan perekonomian. Dampak positif dalam memajukan perekonomian yaitu akan menciptakan efisiensi, dan peningkatan aspek finansial daerah (pendapatan perkapita, serta pertumbuhan sektor industri dan lain-lain). Dengan adanya pengukuran kinerja yang dilakukan secara komprehensif yang meliputi indikator sumber daya yang digunakan, keluaran hasil yang bermanfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta memperhitungkan dampak langsung maupun tidak langsung dari setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan yang dapat terwujudnya akuntabilitas kinerja.

Pengukuran sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bikan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan uang

[1]Moh. Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2006), hal 25

publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. [2] Oleh karena itu pemerintah juga harus bisa mencapai terwujudnya akuntabilitas kinerja dari keuangan tersebut. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dalam melakukan reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya membuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja lembaga sektor publik.

Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik. Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperehensif.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerahnya untuk untuk dilihat apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Desentralisasi yang menciptakan kewenangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik di daerahnya masing-masing desentralisasi juga

[2]Ibid, hal 145

memberikan tanggungjawab daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Upaya dalam peningkatan daerah ini sering dilakukan dengan cara perluasan dan penjaringan para wajib pajak penerimaan dari pajak dan retribusi ini merupakan pendapatan yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah. Salah satu alat ukur untuk menganalisis mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah menggunakan metode *value for money* yang dimiliki kriteria pokok yaitu mendasari pelaksanaan manajemen publik sekarang ini yang ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atau yang dikenal dengan konsep 3E.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan definisi

tersebut belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi juga dibagi menjadi 4 jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dibagi menjadi 5 jenis yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang tidak diperkirakan pengeluarannya.

Kota Bukittinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatra dan Provinsi Sumatra Tengah. Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Bukittinggi
Tahun 2016 - 2020

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Sisa
2017	Belanja pegawai	420.913.585.018,22	397.231.956.868,00	23.681.628.150,22	5,63
	Belanja barang	175.408.415.956,00	140.061.602.007,00	35.346.813.949,00	20,15
	Belanja hibah dan bantuan sosial	14.043.701.895,00	12.441.166.744,00	1.602.535.151,00	11,41
	Belanja modal	127.546.896.058,00	80.926.569.091,00	46.620.326.967,00	36,55
	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00
	Total	**739.912.598.927,22**	**630.661.294.710,00**	**109.251.304.217,22**	14,77
2018	Belanja pegawai	346.504.996.336,34	316.650.194.485,00	29.854.801.851,34	8,62
	Belanja barang	177.078.902.296,00	144.646.454.921,65	32.432.447.374,35	18,32
	Belanja hibah dan bantuan sosial	16.631.760.100,00	13.057.702.637,00	3.574.057.463,00	21,49
	Belanja modal	192.584.978.133,00	115.736.552.854,00	76.848.425.279,00	39,90
	Belanja tidak terduga	72.865.101,00	0,00	72.865.101,00	100,00
	Total	**732.873.501.966,34**	**590.090.904.897,65**	**142.782.597.068,69**	19,48
2019	Belanja pegawai	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	28.760.195.186,39	7,55
	Belanja barang	190.011.599.420,80	154.668.003.960,03	35.343.595.460,77	18,60
	Belanja hibah dan bantuan sosial	22.834.759.000,00	19.032.800.963,00	3.801.958.037,00	16,65
	Belanja modal	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	62.707.724.912,00	26,05
	Belanja tidak terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	4.483.776.500,00	99,64
	Total	**838.880.535.411,22**	**703.783.285.315,06**	**135.097.250.096,16**	16,10
2020	Belanja pegawai	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82	19.109.391.277,79	5,01
	Belanja barang	182.167.460.600,27	150.771.650.352,64	31.395.810.247,63	17,23
	Belanja hibah dan bantuan sosial	21.968.837.629,00	15.485.311.753,00	6.483.525.876,00	29,51

	Belanja modal	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	116.092.635.736,21	38,18
	Belanja tidak terduga	12.000.000.000,00	9.709.406.008,08	2.290.593.991,92	19,09
	Total	**901.512.534.055,88**	**726.140.576.926,33**	**175.371.957.129,55**	19,45
2021	Belanja pegawai	379.480.457.996,00	360.230.406.322,57	19.250.051.673,43	5,07
	Belanja barang	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	33.209.085.306,54	22,20
	Belanja hibah dan bantuan sosial	44.406.037.850,00	38.564.135.187,00	5.841.902.663,00	13,16
	Belanja modal	260.642.165.432,00	249.317.613.815,32	11.324.551.616,68	4,34
	Belanja tidak terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	17.342.997.695,50	35,52
	Total	**882.923.068.255,10**	**795.954.479.299,95**	**86.968.588.955,15**	9,85

Berdasarkan tabel di atas bahwa anggaran belanja Kota Bukittinggi pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 dilihat secara total mengalami selisih positif karena realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan sedangkan kalau dilihat dari realisasi pertahunnya mengalami kenaikan.

Dari data di atas bisa kita ketahui pada tahun 2017 memiliki sisa sebesar 19,44%. yang mana itu termasuk jumlah yang cukup besar. Pada tahun 2018 memiliki sisa sebesar 16,09% jumlah tersebut sudah lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 memiliki sisa sebesar 19,29% yang mana itu mengalami kenaikan pada jumlah sisa yang cukup besar. Pada tahun 2020 memiliki sisa sebesar 9,68% yang mana itu sangat jauh yaitu sebesar 9,61% selisih dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 memiliki sisa sebesar 14,83% yang berarti angkat tersebut naik kembali dari sebelumnya.

Karena hal ini peneliti ingin meneliti apakah sudah ekonomis, efektif dan efektif anggaran dan realisasi belanja selama 5 tahun tersebut. Dimana

bisa dilihat bahwa selisih dari sisa antara anggaran dan realisasi belanja dari tahun ke tahun memiliki jumlah yang lumayan besar contoh pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang memiliki selisih hampir dua kali lipat lebih tepatnya sebesar 9,61%. untuk mengetahui apakah anggaran belanja tersebut peneliti menggunakan metode *value for money*.

Penilaian kinerja sangat penting gunanya untuk mengetahui apakah anggaran belanja Kota Bukittinggi telah merealisasikan dana anggaran belanja tersebut dengan baik. Terutama realisasi terhadap program-program yang secara langsung berhubungan dan dirasakan masyarakat. Dengan menggunakan analisis *value for money* dapat dilihat seberapa besar persentase efisiensi dan efektifitas atas pencapaian target anggaran belanja dengan membandingkan pada realisasi belanja tersebut.

Value for money memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan faktor penting yang untuk meraih keberhasilan pemerintah mencapai pemerintahan yang transparan, ekonomis, efektif, dan akuntabel. Sehingga konsep *value for money* adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk pendukung agar pengelolaan keuangan dan dana daerah. Untuk mendukung agar pengelolaan keuangan dan dana publik yang berdasarkan pada konsep *value for money* hal tersebut juga harus dibarengi dengan tata kelola sisem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang baik. Manfaat dari impelementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam artian

pelayanan yang diberikan tepat sasaran, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilias publik.

Impelentasi konsep *value for money* dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Ada berbagai yang merupakan manfaat dari implementasi konsep *value for money* antara lain : (a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik; (b) Meningkatkan mutu pelayanan publik; (c) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*; (d) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; (e) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang terpadat di Indonesia yang mendapatkan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatan daerahnya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Badan Keuangan Kota Bukittinggi merupakan badan satuan kerja perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Bukittinggi. Badan keuangan merupakan badan yang sangat penting perannya karena mengelola keuangan dan aset di daerah yang sangat besar jumlahnya agar baik dan bisa digunakan oleh kepentingan masyarakat banyak dengan baik. Hal ini tidak bisa tercapai atau terlaksana dengan baik jika tanpa profesionalitas dan indepedensi serta akuntabilitas yang baik bagi setiap pegawainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengukuran Kinerja Belanja Daerah Keuangan Kota Bukittinggi Dengan Menggunakan Metode *Value For Money***".

B. Identifikasi Masalah

1. Pada tahun 2017 anggaran belanja tidak terduga tidak dipakai sama sekali
2. Pada tahun 2018 anggaran belanja tidak terduga tidak dipakai kembali
3. Pada tahun 2019 anggaran belanja tidak terduga hampir tidak digunakan

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas seputas pengukuran kinerja realisasi belanja Kota Bukittinggi menggunakan metode *value for money* yang mana hanya membahas berapa dan bagaimana kinerja realisasi anggaran tersebut dari segi ekonomis, efektif, dan efisiensinya. Data yang digunakan peneliti dari tahun 2017-2021.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja atas realisasi anggaran belanja Kota Bukittinggi jika diukur dengan metode *value for money*
2. Seberapa besar tingkat ekonomis pada realisasi pengeluaran anggaran belanja di Kota Bukittinggi
3. Seberapa besar tingkat efesiensi pada realisasi pengeluaran dan pendapatan di Kota Bukittnggi
4. Seberapa besar efektivitas pada kinerja keuangan di Kota Bukittinggi

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja atas realisasi anggaran belanja Kota Bukittinggi jika menggunakan metode *value for money*.
   b. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ekonomis pada realisasi anggaran belanja Kota Bukittingi.
   c. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada tingkat pengeluaran dan pendapatan Kota Bukittinggi.
   d. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektif kinerja keuangan Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Bagi Penulis

      Penelitian dapat menambah pemahaman dan pengetahuan dalam mengukur kinerja sektor publik melalui pengetahuan penulis yang diperoleh selama berada dibangku kuliah.

   b. Bagi Badan Keuangan Kota Bukittinggi

      Sebagai masukan serta acuan positif bagi Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk mengambil kebijakan serta keputusan dalam rangka untuk mencapai tujuan dinas pemerintahan daerah secara efektif, efisien, ekonomis dalam penyusunan anggaran.

c. Bagi Kampus

Dapat menjadi bahan referensi dan kerangka acuan yang bermanfaat penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini peneliti lakukan yakni tentang Pengukuran Kinerja Belanja Daerah Kota Bukittinggi Dengan Menggunakan Metode *Value for Money*, yang dilakukan di Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi beralamat Jln. Jenderal Sudirman No. 27-29 Belakang Balok Bukittinggi Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

G. Penjelasan Judul

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari salah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian yang ada pada judul ini. Berikut ini dijelaskan maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisan yaitu:

1. Pengukuran kinerja

   Pengukuran kinerja yaitu seberapa besar tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh individu maupun organisasi. Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi publik. Pengukuran kinerja juga bisa menjadi penilaian dalam menilai akuntabilitas organisasi sektor publik.

2. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran adalah anggaran yang digunakan secara nyata. Anggaran yang sudah dianggarkan dipergunakan untuk hal tertentu contoh anggaran digunakan untuk biaya operasional, biaya modal, serta biaya tak terduga. Realisasi anggaran juga hanya terdapat pada biaya tapi ada juga dalam pendapatan yang mana pemerintah menargetkan sejumlah anggaran pendapatan sedangkan yang terealisasi tidak sepenuhnya dari anggaran. Maka itu berarti pendapatan tidak mencapai target yang diinginkan oleh individu atau organisasi tersebut.

3. *Value for money*

Value for money adalah suatu pengukuran kinerja. Dimana kinerja yang diukur dalam *value for money* ini adalah dari segi ekonomis, efektivitas dan efisiensi dari individu, suatu organisasi, atau suatu kelompok. Ekonomis yang berarti sumber daya (*input*) sebaiknya lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati pasar atau *output*. Efisiensi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan melalui terlaksananya semua program atau kegiatan yang telah direncanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja

a. Kinerja

Kinerja adalah suatu tingkat dalam pencapaian dari perlaksanaan kegiataan/program untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi atau perusahaan. Namun menurut PP No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau pro-gram yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu

atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah diterapkan. [3]

Dapat disimpulkan kinerja merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kepada pihak tertentu bagaimana pencapaian hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang telah ditentukan.

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualiatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

1.) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

2.) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang dihadapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.

[3]Moh. Mahsun, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua,* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2007), hal 157

3.) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

4.) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5.) Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja perlu diketahui. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua kelompok kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1.) Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

2.) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.

3.) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif dan yang relevan.

4.) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.

5.) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

6.) Efektif, data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

2. Pengukuran Kinerja

a. Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam suatu organisasi perlu dilakukan pengukuran seluruh aktivitas yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Pengukuran yang dimaksud disini bukan hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran dan manfaat dari program tersebut. Pengukuran kinerja (*performance measurment*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas

tindakan dalam mencapai tujuan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menulai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. [4]

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Ada beberapa cara pengukuran kinerja yang bisa digunakan, antara lain metode *balance score card* dan metode *value for money*. Dalam metode *balance score card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis atau intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*), sedangkan metode *value for money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

1.) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*);

[4]Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik,* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2002), hal 121

2.) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi;

3.) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai keselarasan antara tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai (*goal congruence*); dan

4.) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Sehingga pengukuran kinerja ini memiliki tujuan:

1.) Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja.

2.) Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati

3.) Memonitori dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.

4.) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati.

5.) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.

6.) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

7.) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8.) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

9.) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10.) Mengungkap permasalahan yang terjadi. [5]

c. Elemen Pokok Suatu Pengukuran Kinerja

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1.) Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi.

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran adalah tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang

[5]Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2006), hal 275

digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi

2.) Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menulai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*).

Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi kinerja unit bisnis.

3.) Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-sasaran Organisasi

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi merupakan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.

4.) Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai oleh organisasi tersebut. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback* dan *reward-punishment,* penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.[6]

3. *Value for money*

a. Pengertian *Value for money*

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

---

[6]Melchior Eugenndori Gare, *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value for money Studi Kasus Pada Klinik Adhiwarga PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta,* Skripsi (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2017)

1.) Ekonomi

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2.) Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3.) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

b. Manfaat *Value for money*

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi *Value for money* yang benar adalah:

1.) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran,

2.) Meningkatnya mutu pelayanan publik,

3.) Menurunnya biaya pelayanan publik karena hilangnya inefesiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*,

4.) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan

5.) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

c. Indikator *Value for money*

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikatro kinerja pada *value for money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.

Indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu:

1.) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending les*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2.) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

4. Pengukuran *Value for money*

Adapun metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja salah satunya dengan menggunakan konsep 3E.

a. Ekonomis

Ekonomis (hemat) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara berhati- hati atau cermat (*iprudency*) dan tidak ada pemborosan. suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tak perlu. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

Tingkat Ekonomi:

$$\frac{Input}{\text{Harga } Input} \text{ X } 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Belanja Daerah

Harga *Input* : Anggaran Belanja Daerah

Kriteria ekonomi adalah:

1.) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.
2.) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti ekonomis berimbang.

3.) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x> 100%) berarti tidak ekonomis

b. Efisiensi

Efesiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efesiensi (berdaya guna) dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan (*cash of output*). Proses kegiatan operasional ini dapat dikatakan efesien apabila produk yang dihasilkan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana serendah-rendahnya {speding well). Berikut formula untuk mengukur tingkat efesiensi:

Tingkat efesiensi:

$$\frac{Input}{Output} \text{ X } 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi belanja daerah

Output : Sisa antara realisasi dan anggaran belanja daerah

Kriteria efisiensi adalah:

1.) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efesien.

2.) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti efesiensi berimbang.

3.) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x> 100%) berarti tidak efesien.

c. Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

Tingkat Efektivitas:

$$\frac{Outcome}{Output} \text{ X } 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja daerah

Output : Sisa antara realisasi dan anggaran belanja daerah

Kriteria efektivitas adalah:

1.) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.

2.) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti efektivitas berimbang.

3.) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x> 100%) berarti efektif.[7]

5. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.[8]

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 membahas tentang pengelolaan keuangan daerah yang mana adalah sebagai berikut: keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah menurut keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Pemendagri Nomor 13 tahun 2006) tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara

[7]Moh. Mahsun, Op.cit hal 158-159

[8] Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hal. 43

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah: Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termaksud di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hak yang dimaksud adalah hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Serta kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.[9]

Berdasarkan Per mendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;

[9] Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), Hal. 11

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak- hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f. Kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.

Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah:

a. Partisipasi masyarakat,

b. Transparan atau keterbukaan,

c. Keadilan dalam distribusi alokasi anggaran, dan

d. Akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

6. Anggaran Sektor Publik

Anggaran adalah rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayainya. Anggaran publik berisikan rencana kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana kegiatan, rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter dan berisi estimasi mengenai apa yang hendak dicapai atau dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang atau secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran atau pendapatan).
2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Dari pengertian diatas terlihat jelas bahwa pada anggaran (pemerintah) didahulukan pengeluaran baru mencari penerimaan, hal ini berbeda dengan anggaran pada perusahaan justru sebaliknya mendahulukan sumber-sumber pendapatan baru kemudian merencanakan pengeluaran. Perbedaan ini dikarenakan pada organisasi yang tidak mencari laba seperti pemerintah lebih mengutamakan pemakaian dana untuk kepentingan jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, walaupun segi efisiensi masih tetap diperhitungkan. Sedangkan bagi perusahaan tujuan utamanya adalah mencari laba maka pemakaian laba harus benar- benar diperhitungkan untung ruginya sehingga pendapatan diharapkan sebanyak- banyaknya dan pengeluaran seefisiensi mungkin dengan harapan akan mendatangkan keuntungan.

a. Belanja

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. [10]

[10]Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

b. Anggaran

Menurut *Governmental Accounting Standarts Board* (GASB), anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

7. Belanja Daerah

Belanja Daerah Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE. 900/079/BAKD pada 12 Februari Tahun 2008 tentang kebijakan akuntansi Nomor 7 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja berdasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga. Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, seperti belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah, belanja dinas, belanja kantor, dan lembaga teknis daerah.

Klasifikasi- klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1. Belanja pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri baik kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan termasuk pembayaran honorium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja barang dan jasa, dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis dipakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga termasuk pembayaran honorium kegiatan kepada non pegawai, pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja perjalanan.

3. Belanja bunga, merupakan akun belanja untuk pembayaran alokasi bunga (*Interest*) yang dihitung atas kewajiban penggunaan

pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya- biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda serta dirinci menurut objek belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan objek sejenis lainnya sesuai Akun Bagan Standar yang berlaku.[11]

4. Belanja subsidi, merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jual produksi / impor/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

5. Belanja hibah, merupakan transfer dalam bentuk uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah yang bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

6. Belanja bantuan sosial, merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

b. Belanja Modal

[11] Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
5. Belanja modal aset tatap lainnya

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan ke dalam keperluan mendesak dan keadaan darurat, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit, serta pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja daerah juga dapat dikatakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang akan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai , (honorium atau upah), belanja dan jasa, dan belanja modal.

b. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.[12]

8. Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah ialah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014,

[12] Nordian Dedi, Dkk, Akuntansi Pemerintahan, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hal. 40

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[13]

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak- pihak eksternal entitas pemerintah daerah.

Jenis- jenis laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Laporan realisasi anggaran

b. Neraca

c. Laporan arus kas

d. Catatan atas laporan keuangan

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Pentingnya pemublikasian laporan keuangan adalah:

a. Internal

[13] Moh. Khusaini, Keuangan Daerah, (Malang: UB Press, 2018), Hal. 2

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan, maupun unit-unit di dalamnya (satuan kerja perangkat daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*Internal accountibility*), yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.

b. Eksternal

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*External Accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada daerah, kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak- pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi- informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.[14]

[14] Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), Hal. 3

Untuk mengetahui keuangan suatu organisasi apakah tergolong baik atau tidak, kita dapat melihatnya dari laporan keuangan. Secara harus besarnya tujuan dari penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

a. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

b. Untuk alat akuntabilitas publik

c. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Laporan keuangan pemerintah daerah disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pengguna (*General purposive*), meskipun setiap kelompok memiliki kebutuhan informasi yang berbeda- beda. Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

a. Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan

b. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah mereka berikan. Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan anggaran dan ketaatan pada peraturan atas

pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak yang telah mereka bayar telah dibelanjakan untuk kepentingan publik, apakah hak-hak publik untuk mendapatkan pelayanan telah terpenuhi dengan baik.

c. Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat rasio berinvestasi, kondisi kesehatan finansial daerah yang tingkat likuiditas dan solvabilitas daerah.

d. DPRD dan kelompok publik informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara.

e. Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi lain yang sejenis.

9. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menghasilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola pemerintah dalam satu periode. laporan realisasi anggaran merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

PP No. 71 tahun 2010 LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat sesuai dengan anggarannya (APBN atau APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.[15]

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara ter sanding untuk satu periode tertentu. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, estimasi pendapatan dan apropasi belanja di sajikan pada kolom anggaran, sedangkan realisasi anggaran disajikan pada kolom realisasi. Laporan realisasi anggaran menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA

[15] Abdul Halim, Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hal. 284

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh kas umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana berimbang dan dana bagi hasil.

d. Surplus/ defisit LRA

Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran

berikutnya yang mana dalam anggaran pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa)

Selisih lebih kurang antara realisasi anggaran pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran selama satu periode.

10. Landasan Syariah

Dalam pandangan ekonomi Islam, dalam melakukan pekerjaan terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh individu relevan dengan standar tertentu pekerjaan dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran realisasi belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama beberapa periode anggaran.[16]

Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, Allah mengungkapkan dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melakukan segala perintah Allah maka Allah akan memberikannya pahala. Justru sebaliknya ketika manusia melanggar aturan yang telah di gariskan- Nya, maka Allah mengazabnya dengan siksaan yang pedih,

[16] Ima Amliah, Dkk, Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kerja*, Jurnal Mimbar,* Vol. 29 No. 23, (2013), Hal. 167

sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antarnya surat Al-Kahfi ayat 87-88 yang berbunyi:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

Artinya : "(87)*Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.* (88) *Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami"*

B. Kajian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya studi- studi terdahulu yang relevan. Adanya studi terdahulu menjadi referensi dalam menyusun penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian lain hanya membahas perihal belanja yang mana di dalamnya terdapat belanja daerah yang hanya dibahas secara sekilas, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas khusus tentang belanja daerah yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan segala komponen dari belanja daerah tersebut. Sehingga hasil kesimpulan penelitian ini nantinya tidak hanya menilai seberapa ekonomis, efisiensi, dan efektifnya keuangan belanja daerah tersebut, namun juga disertai dengan menilai efektif atau tidaknya realisasi dari komponen belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja modal (belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap

lainnya, belanja modal aset lainnya), belanja tidak terduga. Untuk judul dan hasil penelitian dari beberapa studi terdahulu dapat terlihat pada tabel.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yosie Dwinanda, tahun 2018	Analisis *value for money* Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Analisis kualitatif	Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari seluruh kegiatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kinerja yang ekonomis, cukup efisien dan kurang efektif.
2.	Galang Irgi Saputra, tahun 2021	Anilisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode *Value for money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2020	Analisis deskriptif kuantitatifdan kualitatif	Hasil penelitian tersebut maka konsep *value for money* sangat baik untuk diterapkan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah karena dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan gambaran kinerja yang komprehensif.
3.	Yuyun Novita Sari, tahun 2020	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip *Value for money*	Metode deskriptif	Hasil penelitian tersebut adalah kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio

		(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)		ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan.
4.	Dhimas angga Permana, ISSN 2460-0585 Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 5, Mei 2017	Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Value for money*	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam segi ekonomi yang mengacu pada anggaran (*input*) dengan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi terlihat dari jumlah realisasi output yang dihasilkan terhadap input. Sedangkan efektivitas dapat dilihat dari *output* maupun *outcome* yang dinilai berhasil berdasarkan tujuan instansi dalam melaksanakan program kegiatan.
5.	Dika Husni Sanjaya, e-ISSN 2460-0580 Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, September 2020	Analisis *Value for money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan pengukuran efektivitasnya sudah berhasil, efisiensi sudah berhasil, dan segi ekonomis suah berhasil.
6.	Harry Saputra Liando, David Paul Elia	Anilisis Kinerja Keuangan	Metode Kualitaif	Hasil analisis kinerja keuangan pemerintah

	Saerang, dkk,ISSN 2303-1174 Jurnal EMB, Vol. 2 No. 3 September 2014	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value for money*		Kabupaten Kepulauan Sangihe dari segi ekonomis pemerintah harus lebih hemat dan tepat sasaran dalam mengoptimalkan anggaran dari segi efektivitas dapat diperbaiki dengan upaya meningkatkan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan data yang ada dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun kelapangan atau pada objek penelitian.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian dapat diproses dan dianalisis kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuanlitatif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data kualitatif berupa angka- angka yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur keuangan daerah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No 27-29 Belakang Balok Bukittinggi 26136 Telp. (0752)32485-7028932-625740 Fax 0752-625448.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu berupa data anggaran dan realisasi belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2016-2020. Sedangkan data primer yaitu berupa penjelasan langsung dari Kabid Anggaran tentang anggaran belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

D. Informan Penelitian

Informan adalah objek untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti dan menjadi informan dari yang terkait di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah salah satu pegawai yang bekerja di Badan Keuangan. Salah satu nama pegawai yang akan diwawancarai yaitu Tedy Hermawan, S.T, M,Sc.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Obervasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat bagaimana kegiatan dilakukan.[17] Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan pada objek

[17] Riduwan, *Metodologi Risert*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 104

yang akan diteliti secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai fakta dan data yang diperoleh lewat pengamatan nantinya akan dikumpulkan untuk menarik sebuah informasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan melalui lisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. [18]

Dokumentasi tersebut berupa tulisan-tulisan, ketikan berbentuk catatan, buku, naskah dokumen ataupun arip-arsip yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Dari dokumentasi tersebut nantinya peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dengan mempelajari bahan tertulis sehingga dapat membantu penulis dalam mencari informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

F. Metode Analisis Data

1. *Collecting*/Pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan anggaran dan realisasi dari belanja dan pendapatan

[18] Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

yang diperoleh dari hasil observasi. Hasil tersebut akan dibuat dokumentasi berupa tulisan. .

2. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif (*Descriptive Kualitative Analysis Method*). Setelah data terkumpul, selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara diklasifikasi dan dianalisis.
3. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan periode waktu *year-to-year* dimana peneliti akan melakukan perbandingan elemen keuangan yang ada untuk melihat setiap perubahan yang terjadi.
4. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada laporan realisasi dan anggaran instansi/perusahaan. Kemudian peneliti mengklarifikasi data yang telah diperoleh, dan mengolah serta menghubungkansemua data yang telah diperoleh dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja tahun 2016 sampai dengan 2020 untuk mengetahui kinerja realisasi anggaran Kota Bukittinggi, maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :
   a. Tingkat ekonomis

      $$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

   b. Tingkat efisiensi

$$\frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Tingkat efektivitas

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

5. Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa analisis dan hasil dari perhitungan menurut rumus, sehingga peneliti dapat menguasai data. Penyajian data ini dilakukan dengan evaluasi kinerja realisasi anggaran yang telah dianalisis.
6. Penarikan kesimpulan, melakukan simpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengukuran kinerja atas realisasi anggaran Kota Bukittinggi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

1. Sejarah Instansi

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang- undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 20), Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Nomor 6, tambahannya nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bukittinggi menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 Ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pasal 3 ayat (1) peraturan 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan susunan daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada tanggal 2 Desember 2016, maka perlu menetapkan peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan, tugas, dan fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan.

2. Lokasi Instansi

Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi beralamat di Jl. Sudirman No 27-29, Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181. Kantor Badan Keuangan sendiri merupakan bangunan Kantor Walikota lama sebelum dipindahkan ke Jalan Kesuma Bhakti Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

3. Visi Misi

Visi merupakan suatu pandangan ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Adapun visi dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu "Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel bedasarkan peraturan perundang-undangan.

Proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Dalam rangka mencapai visi tersebut disusun misi sebagai suatu rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam menjabarkan visi yang telah ditetapkan.

Misi dari Badan Keuangan ini juga mempedomani dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Misi Badan Keuangan Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemerintahan yang baik.
b. Mewujudkan akuntabilitas manajemen pengelolaan keuangan daerah.
c. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terstruktur dan berkualitas.
d. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah yang proffesional, akuntabel dan transparan.
e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan aset.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, karena itu terdapat 5 (lima) misi atau langkah utama untuk mencapai visi Badan sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang keuangan Kota Bukittinggi. Fungsi dan peran penting bagi pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan Kota Bukittinggi harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintah yang terkelola dengan baik.

4. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas Badan Keuangan Kota Bukittinggi menetapkan 5 tujuan yang akan dicapai dalam

5 tahun kedepan sebagai berikut :

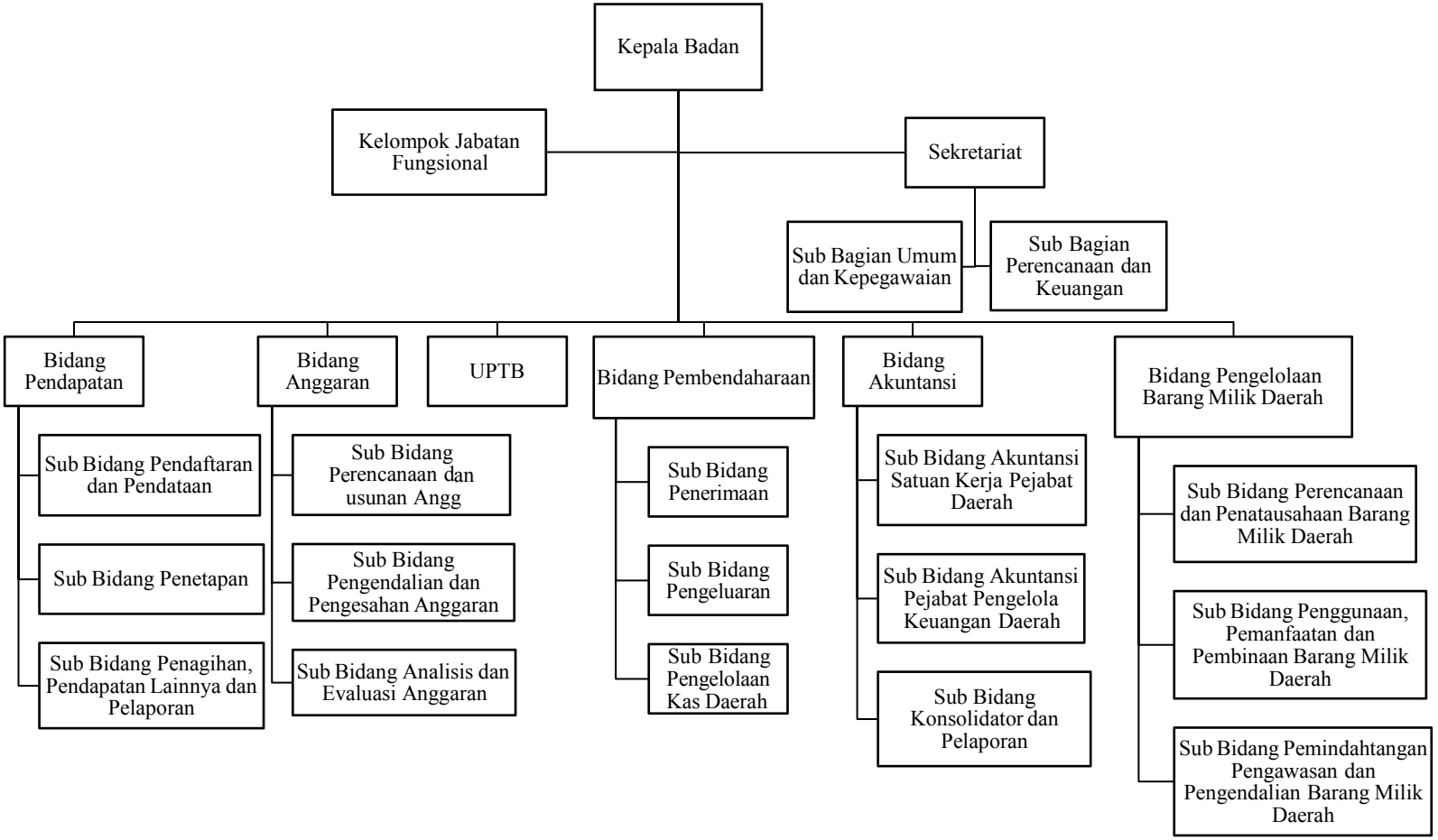
a. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik
b. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan yang baik
c. Meningkatkan pendapatan keuangan daerah yang sinergis dan realistis
d. Terciptanya tata pengelolaan keuangan yang profesional, transparandan akuntabel.
e. Terdapatnya potensi kekayaan daerah yang dapat memberikan konstribusi dalam penerimaaan daerah.

Tujuan pertama adalah tujuan umum manajemen organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinngi, sedangkan tujuan kedua hingga kelima adalah bagian yang menggambarkan fungsi pengelolaan Badan Keuangan Kota Bukittinggi, sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan di Kota Bukittinggi.

5. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut struktur organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Susunan Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi



Sumber : Peraturan Wali Kota Bukittinggi No 55 Tahun 2019

6. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran,tujuan, serta visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemampuan sumber daya Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah (Penerimaan dan Penganggaran) dan Pengelolaan Aset Daerah (Modal sumber Daya).
b. Meningkatkan kualitas sistem akuntansi yang efektif,efisien dan akuntabel.
c. Meningkatkan pelayanan prima.
d. Mengembangkan potensi dan sumber daya daerah.
e. Meningkatkan kapasitas pengembangan badan keuangan kota Bukittinggi.

7. Struktur Organisasi Kerja Industri Mitra

Setiap perusahaan membentuk struktur organisasi yang menunjukkan tanggung jawab untuk setiap posisi pekerjaan dan hubungan antar posisi tersebut. Struktur posisi mengandung arti penetapan batasan- batasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing pegawai.

Susunan organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi :

a. Kepala badan
b. Sekretariat, terdiri atas :

1) Sub bagian umum dan kepegawaian;

2) Sub bagian perencanaan dan keuangan.

c. Bidang pendapatan, terdiri atas :

1) Sub bidang pendaftaran dan pendataan;

2) Sub bidang penetapan;

3) Sub bidang penagihan, pendapatan lainnya dan pelaporan.

d. Bidang Anggaran, terdiri atas :

1) Sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;

2) Sub bidang pengendalian dan pengesahan anggaran;

3) Sub bidang analisis evaluasi anggaran.

e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

1) Sub bidang penerimaan;

2) Sub bidang pengeluaran;

3) Sub bidang pengelolaan kas daerah.

f. Bidang akuntansi, terdiri atas :

1) Sub bidang akuntansi satuan kerja perangkat daerah;

2) Sub bidang akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah;

3) Sub bidang konsolidator dan pelaporan.

g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :

1) Sub bidang perencanaan dan penata usahaan Barang Milik Daerah

2) Sub bidang penggunaan, pemanfaatan dan pembinaan Barang Milik Daerah;

3) Sub bidang pemindah tanganan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Pembahasan

1. Perhitungan Tingkat Ekonomis Belanja Daerah Kota Bukittinggi

Rasio ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*Input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* (harga input) yang dinyatakan dalam satuan moneter. Kinerja suatu kegiatan fisik pekerjaan pembangunan jalan dikatakan ekonomis apabila *input* lebih kecil dari pada harga *input,* artinya bahwa dana realisasi yang digunakan lebih kecil dari anggaran yang telah dianggarkan.

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran ekonomis belanja daerah Kota Bukitttinggi selama 5 tahun yaitu dari tahun 2017-2021 :

Tabel 4.1
Tabel Ekonomis Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017-2021

Tahun	Uraian	Realisasi Belanja Daerah (Input)	Anggaran Belanja Daerah (Harga Input)	Ekonomis
2017	Belanja pegawai	397.231.956.868,00	420.913.585.018,22	94,37
	Belanja barang	140.061.602.007,00	175.408.415.956,00	79,85
	Belanja hibah dan bantuan sosial	12.441.166.744,00	14.043.701.895,00	88,59
	Belanja modal	80.926.569.091,00	127.546.896.058,00	63,45
	Belanja tidak terduga	0,00	2.000.000.000,00	0,00
	Total	**630.661.294.710,00**	**739.912.598.927,22**	**85,23**
2018	Belanja pegawai	316.650.194.485,00	346.504.996.336,34	91,38
	Belanja barang	144.646.454.921,65	177.078.902.296,00	81,68
	Belanja hibah dan bantuan sosial	13.057.702.637,00	16.631.760.100,00	78,51
	Belanja modal	115.736.552.854,00	192.584.978.133,00	60,10
	Belanja tidak terduga	0,00	72.865.101,00	0,00
	Total	**590.090.904.897,65**	**732.873.501.966,34**	**80,52**
2019	Belanja pegawai	352.055.439.698,03	380.815.634.884,42	92,45
	Belanja barang	154.668.003.960,03	190.011.599.420,80	81,40
	Belanja hibah dan bantuan sosial	19.032.800.963,00	22.834.759.000,00	83,35
	Belanja modal	178.010.817.194,00	240.718.542.106,00	73,95
	Belanja tidak terduga	16.223.500,00	4.500.000.000,00	0,36
	Total	**703.783.285.315,06**	**838.880.535.411,22**	**83,90**
2020	Belanja pegawai	362.187.753.715,82	381.297.144.993,61	94,99
	Belanja barang	150.771.650.352,64	182.167.460.600,27	82,77
	Belanja hibah dan bantuan sosial	15.485.311.753,00	21.968.837.629,00	70,49

	Belanja modal	187.986.455.096,79	304.079.090.833,00	61,82
	Belanja tidak terduga	9.709.406.008,08	12.000.000.000,00	80,91
	Total	**726.140.576.926,33**	**901.512.534.055,88**	**80,55**
2021	Belanja pegawai	360.230.406.322,57	379.480.457.996,00	94,93
	Belanja barang	116.356.834.683,56	149.565.919.990,10	77,80
	Belanja hibah dan bantuan sosial	38.564.135.187,00	44.406.037.850,00	86,84
	Belanja modal	249.317.613.815,32	260.642.165.432,00	95,66
	Belanja tidak terduga	31.485.489.291,50	48.828.486.987,00	64,48
	Total	**795.954.479.299,95**	**882.923.068.255,10**	**90,15**

Sumber : Dokumen Badan Keuangan Tahun 2017-2021 (sudah diolah)

Untuk menghitung hasil dari tabel 4.1 adalah dengan cara menggunakan data realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah. Dalam perhitungan ekonomis realisasi belanja daerah (*input*) akan dibagi dengan anggaran belanja daerah (harga *input*) kemudian dikalikan 100% agar mendapatkan hasil persentase dari nilai ekonomis belanja daerah.

Dilihat dari tabel 4.1 pengukuran rasio ekonomis pada belanja daerah Kota Bukittinggi terjadi penghematan yang sangat signifikan pada belanja tak terduga. Akan tetapi ada kenaikan pada persentase tiap tahunnya pada belanja tak terduga tersebut. Pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada nilai ekonomisnya dikarenakan sama sekali tidak menggunakan dana terbut lain halnya dengan tahun 2019 yang mana tingkat ekonomis dari belanja tidak terduga sebesar 0,36% pada tahun 2020 sebesar 80,91% dan pada tahun

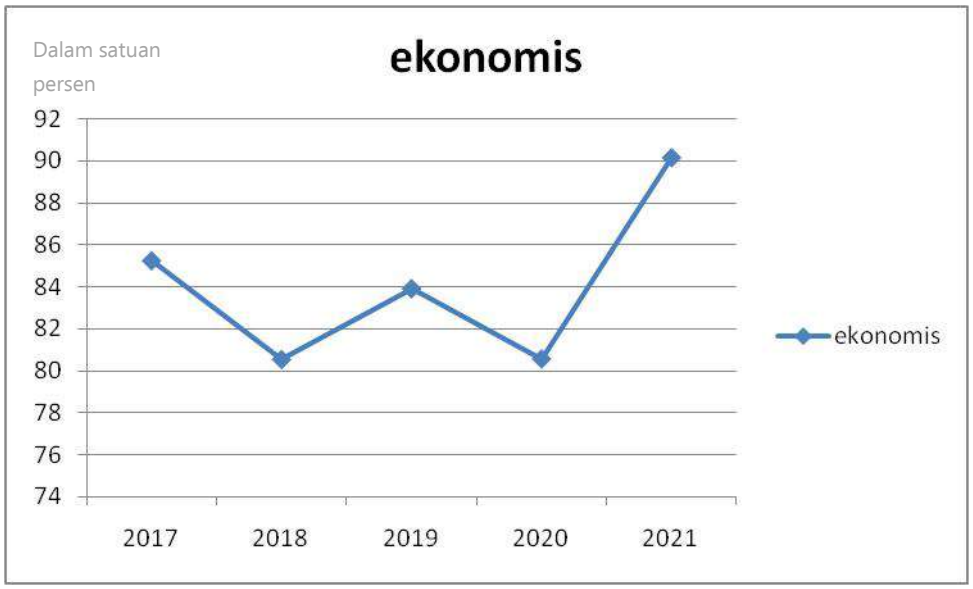
2021 sebesar 64,48%.

Belanja tidak terduga ini melonjak atau banyak digunakan karena pada saat tahun 2020 dan 2021 maraknya pandemi Covid-19 yang mana itu merupakan suatu bencana. Sesuai dengan fungsinya belanja tidak terduga ini digunakan apabila terjadi bencana dan sebagainya. Untuk memperkuat argumen ini adapun hasil wawancara peneliti terhadap salah satu pegawai Badan Keuangan tersebut yaitu :

"B*elanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka memenuhi penyelenggaraan wewenang pemerintah daerah."*

Berikut ini adalah grafik dari rasio ekonomis belanja daerah Kota Bukittinggi pada bagian total dari tahun 2017-2021 :

Grafik 4.1
Grafik Ekonomis Total Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017-2021



Pada grafik 4.1 menggunakan data dari total keseluruhan belanja daerah setiap tahunnya yaitu dari tahun 2017-2021. Cara menghitung untuk grafik ekonomis sama seperti menghitung tabel ekonomis 4.1.

Dilihat dari grafik 4.1 bahwa total dari penggunaan belanja daerah Kota Bukittinggi mengalami naik turun nilai ekonomisnya. Dapat dilihat pada tahun 2017 nilai ekonomis dari belanja daerah yaitu sebesar 85,23% pada tahun 2018 sebesar 80,52% pada tahun 2019 sebesar 83,90% pada tahun 2020 sebesar 80,55% dan pada tahun 2021 90,15% yang mana berarti pada tahun ini mengalami kenaikan cukup besar.

Dari hasil perhitungan secara menyeluruh belanja daerah Kota Bukittinggi yang menunjukkan hasil bahwa nilai ekonomis dari belanja tersebut dibawah 100%. Sehingga dapat diartikan bahwa belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2017-2021 dikatakan

ekonomis. Dilihat dari nilai *input* (realisasi belanja) lebih kecil dari harga *input* (anggaran belanja).

2. Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Kota Bukittinggi

Rasio efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimal dengan *input* tertentu atau *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Belanja daerah Kota Bukittinggi dikatakan efisiensi apabila *output* lebih besar daripada *input,* artinya bahwa dengan realisasi yang digunakan bisa menghasilkan *output* yang lebih besar. Data *output* dalam penelitian ini diperoleh dari selisih antara anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Bukittinggi. Nilai *input* didapat dari realisasi belanja daerah Kota Bukittinggi.

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran efisiensi belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 :

Tabel 4.2
Tabel Efisiensi Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017-2021

Tahun	Uraian	Realisasi Belanja Daerah (Input)	Sisa Realisasi dan anggaran (Output)	Efisiensi
2017	Belanja pegawai	397.231.956.868,00	23.681.628.150,22	16,77
	Belanja barang	140.061.602.007,00	35.346.813.949,00	3,96
	Belanja hibah dan bantuan sosial	12.441.166.744,00	1.602.535.151,00	7,76
	Belanja modal	80.926.569.091,00	46.620.326.967,00	1,74
	Belanja tidak terduga	0,00	2.000.000.000,00	0,00

	Total	**630.661.294.710,00**	**107.648.769.066,22**	**5,86**
2018	Belanja pegawai	316.650.194.485,00	29.854.801.851	10,61
	Belanja barang	144.646.454.921,65	32.432.447.374,35	4,46
	Belanja hibah dan bantuan sosial	13.057.702.637,00	3.574.057.463,00	3,65
	Belanja modal	115.736.552.854,00	76.848.425.279,00	1,51
	Belanja tidak terduga	0,00	72.765.101,00	0,00
	Total	**590.090.904.897,65**	**139.208.539.605,69**	**4,24**
2019	Belanja pegawai	352.055.439.698,03	28.760.195.186,39	12,24
	Belanja barang	154.668.003.960,03	35.343.595.460,77	4,38
	Belanja hibah dan bantuan sosial	19.032.800.963,00	3.801.958.037,00	5,01
	Belanja modal	178.010.817.194,00	62.707.724.912,00	2,84
	Belanja tidak terduga	16.223.500,00	4.483.776.500,00	0,00
	Total	**703.783.285.315,06**	**131.295.292.059,16**	**5,36**
2020	Belanja pegawai	362.187.753.715,82	19.109.391.277,79	18,95
	Belanja barang	150.771.650.352,64	31.395.810.247,63	4,80
	Belanja hibah dan bantuan sosial	15.485.311.753,00	6.483.525.876,00	2,39
	Belanja modal	187.986.455.096,79	116.092.635.736,21	1,62
	Belanja tidak terduga	9.709.406.008,08	902.905.939,92	10,75
	Total	**726.140.576.926,33**	**167.500.743.201,55**	**4,34**
2021	Belanja pegawai	360.230.406.322,57	19.250.051.673,43	18,71
	Belanja barang	116.356.834.683,56	33.209.085.306,54	3,50
	Belanja hibah dan bantuan sosial	38.564.135.187,00	5.841.902.663,00	6,60
	Belanja modal	249.317.613.815,32	11.324.551.616,68	22,02
	Belanja tidak terduga	31.485.489.291,50	17.342.997.695,50	1,82

	Total	**795.954.479.299,95**	**81.126.686.292,15**	**9,81**

Sumber : Dokumen Badan Keuangan Tahun 2017-2021(sudah diolah)

Untuk menghitung hasil dari tabel 4.2 adalah dengan cara menggunakan data realisasi belanja daerah dan sisa realisasi dan anggaran. Dalam perhitungan efisiensi realisasi belanja daerah (*input*) akan dibagi dengan sisa realisasi dan anggaran (*output*) kemudian dikalikan 100% agar mendapatkan hasil persentase dari nilai efisiensi belanja daerah.

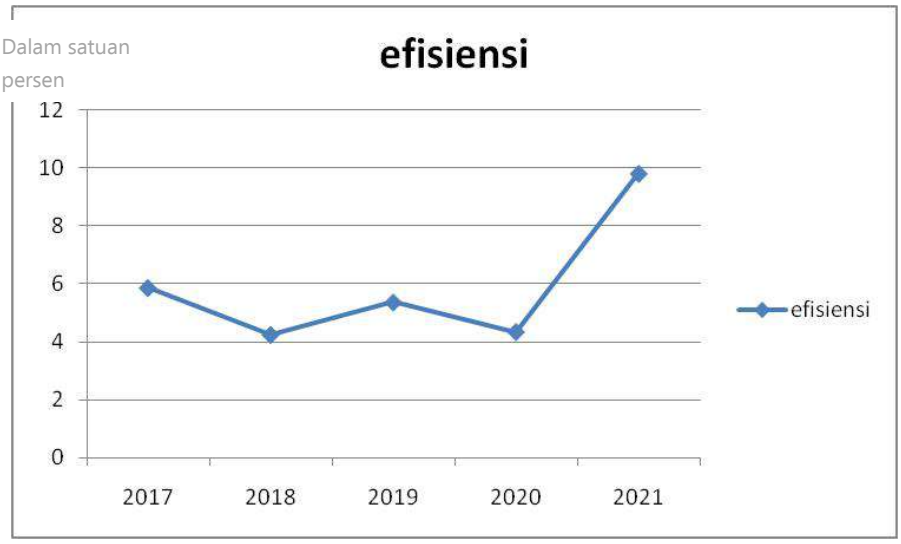
Dilihat dari tabel 4.2 bahwa belanja daerah Kota Bukittinggi nilai efisiensinya sangat kecil-kecil. Dapat diartikan bahwa belanja daerah Kota Bukittinggi sangat efisien. Pada tabel belanja yang memiliki nilai efisiensi yang paling besar yaitu belanja modal pada tahun 2021 sebesar 22,02%. Tetapi pada belanja pegawai nilai efisiensi tidak pernah mencapai nilai di bawah 10%. seperti pada tahun 2017 nilai efisiensi belanja pegawai sebesar 16,77% pada tahun 2018 sebesar 10,61% pada tahun 2019 sebesar 12,24% pada tahun 2021 sebesar 18,95% dan pada tahun 2021 sebesar 18,71%.

Dapat dilihat juga pada tabel 4.2 yang mana *input* pada belanja tidak terduga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dikarenakan penggunaan dana untuk menangani pandemi. Tetapi pemerintah tetap melakukan bagaimana agar belanja daerah tersebut tetap efisien. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pegawai dari Badan Keuangan yaitu :

"Belanja daerah Kota Bukittinggi direncanakan atau dilkukan secara efisien sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 dengan meminimalisirkan belanja pegawai, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Itulah, sebab pada tahun 2017 dan 2018 realisasi belanja tidak terduga tidak ada. Hal ini dilakukan untuk menggunakan dana seefisien mungkin. Tetapi pada tahun 2019 sampai 2021 itu belanja tak terduga terus naik dikarenakan kita mengalami masa pandemi pada saat itu yang mana pendapatan daerah pun cukup berkurang, hal tersebut tidak tetap tidak bisa menjad alasan untuk pemerintah menggunakan dana dengan cara tidak efisien. Pemerintah tetap melakukan cara bagaimana anggara belanja digunakan secara efisien."

Berikut ini adalah grafik nilai efisiensi belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2017-2021 :

Grafik 4.2
Grafik Efisiensi Total Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017-2021



Pada grafik 4.2 menggunakan data dari total keseluruhan belanja daerah setiap tahunnya yaitu dari tahun 2017-2021. Cara menghitung untuk grafik ekonomis sama seperti menghitung tabel efisiensi 4.2

Dapat dilihat pada grafik 4.2 bahwa nilai efisiensi dari mengalami naik turun dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,81% yang berbeda jauh pada tahun 2020 hanya sebesar 4,34% yang mana memiliki selisih sebesar 5,47%. Tetapi hal ini tidak berpengaruh pada nilai efisiensi dari belanja daerah Kota Bukittinggi. Dari tahun 2017-2021 hasil dari perhitungan efisiensi belanja daerah Kota Bukittinggi menunjukkan nilai di bawah 100%. sehingga dapat diartikan bahwa belanja daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2017-2021 sudah dilakukan secara efisien.

3. Perhitungan Tingkat Efektivitas Belanja Daerah Kota Bukittinggi

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak *outcome* dari *output* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja belanja daerah Kota Bukittinggi dikatakan efektif apabila nilai yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%.

semakin tinggi nilai efektivitas semakin naik kinerja belanja daerah Kota Bukittinggi.

Berikut ini adalah tabel tingkat efektivitas belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2017-2021 :

Tabel 4.3
Tabel Efektivitas Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017-2021

Tahun	Uraian	Outcome (%)	Output (%)	Efektivitas
2017	Belanja pegawai	105,96	5,63	1.883,35
	Belanja barang	125,24	20,15	621,49
	Belanja hibah dan bantuan sosial	112,88	11,41	989,22
	Belanja modal	157,61	36,55	431,19
	Belanja tidak terduga	0,00	100,00	0,00
	Total	**117,32**	**14,77**	**794,58**
2018	Belanja pegawai	109,43	8,62	1.270,06
	Belanja barang	122,42	18,32	668,41
	Belanja hibah dan bantuan sosial	127,37	21,49	592,72
	Belanja modal	166,40	39,90	417,00
	Belanja tidak terduga	0,00	100,00	0,00
	Total	**124,20**	**19,48**	**637,48**
2019	Belanja pegawai	108,17	7,55	1.432,28
	Belanja barang	122,85	18,60	660,46
	Belanja hibah dan bantuan sosial	119,98	16,65	720,58
	Belanja modal	135,23	26,05	519,10
	Belanja tidak terduga	27.737,54	99,64	27.837,90
	Total	**119,20**	**16,10**	**740,14**

2020	Belanja pegawai	105,28	5,01	2.100,62
	Belanja barang	120,82	17,23	701,05
	Belanja hibah dan bantuan sosial	141,87	29,51	480,71
	Belanja modal	161,76	38,18	423,68
	Belanja tidak terduga	123,59	19,09	647,47
	Total	**124,15**	**19,45**	**638,21**
2021	Belanja pegawai	105,34	5,07	2.076,67
	Belanja barang	128,54	22,20	578,92
	Belanja hibah dan bantuan sosial	115,15	13,16	875,28
	Belanja modal	104,54	4,34	2.406,11
	Belanja tidak terduga	155,08	35,52	436,63
	Total	**110,93**	**9,85**	**1.126,15**

Sumber : Dokumen Badan Keuangan Tahun 2017-2021 (sudah diolah)

Untuk menghitung hasil dari tabel 4.3 adalah dengan cara menggunakan data realisasi belanja daerah, anggaran belanja daerah serta sisa realisasi dan anggaran. Dalam perhitungan efektivitas anggaran belanja akan dibagi dengan realisasi belanja daerah untuk mendapatkan *outcome* kemudian diubah dalam bentuk persen. Setelah mendapatkan *outcome* hasil tersebut akan dibagi dengan sisa realisasi dan anggaran (*output*) kemudian dikalikan 100% agar mendapatkan hasil persentase dari nilai efektivitas belanja daerah.

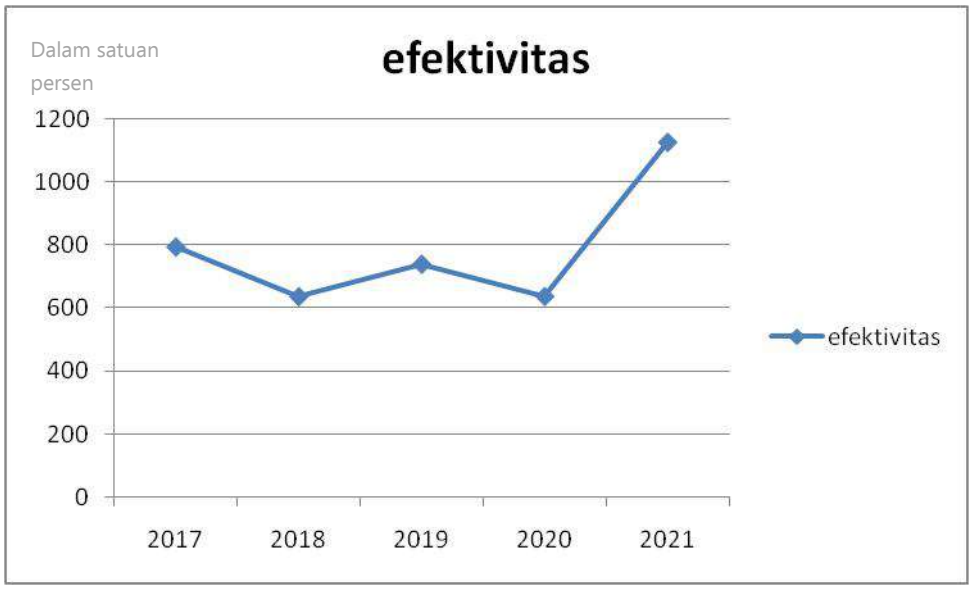
Dilihat dari tabel 4.3 belanja tidak terduga pada tahun 2017 dan 2018 nilai efektivitasnya yaitu 0,00% yang berarti bahwa pada

tahun itu dana belanja tidak terduga tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2019 belanja tidak terduga sangat efektif dibandingkan dengan yang lain karena nilai efektifnya sebesar 27.837,90% yang mana nilai tersebut di atas 100% seperti yang diketahui bahwa kategori nilai efektivitas semakin besar nilainya maka semakin efektif suatu program tersebut.

Ketika dilihat pada tabel 4.3 hampir semua kategori belanja sudah efektif tetapi ada 2 tahun yaitu tahun 2017 dan 2018 pada belanja tidak terduga dikategorikan tidak efektif karena nilai dari efektifitasnya hanya 0,00%. Hal ini dikarenakan tidak ada tujuan atau target yang hendak dicapai atas belanja tidak terduga hal ini bisa dilihat juga tabel 1.1 pada bagian belanja tidak terduga dimana dana tersebut tidak digunakan sama sekali.

Berikut ini adalah grafik efektivitas dari total belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2017-2021 :

Grafik 4.3
Grafik Efektivitas Total Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017-2021



Grafik efektivitas menggunakan hasil total belanja daerah setiap tahunnya yaitu dari tahun 2017-2021. Cara perhitungan untuk grafik 4.3 sama seperti cara menghitung untuk tabel 4.3

Dapat dilihat pada grafik 4.3 bahwa nilai dari efektivitas secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Tetapi pada tahun 2021 itu merupakan nilai efektivitas belanja daerah Kota Bukittinggi yang tertinggi sebesar 1.126,15% dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2021 inilah pelaksanaan belanja yang paling efektif diantara tahun 2017-2021. Ketika dilihat secara keseluruhan pemerintah sudah melaksanakan atau menggunakan dana belanja daerah secara efektif.

4. Hasil Analisis Dari Perngukuran Kinerja Belanja Daerah Menggunakan Metode *Value For Money*

a. Perhitungan Ekonomis

Secara teori perhitungan ekonomis dari tahun 2017-2021

belanja daerah dinilai sudah ekonomis. Akan tetapi pada belanja tidak terduga tahun 2017 dan 2018 dinilai kurang ekonomis dikarenakan nilai ekonomis 0,00%. Hal ini dipengaruhi realisasi belanja tidak terduga pada tahun tersebut tidak digunakan sama sekali.

Berdasarkan dari hasil perhitungan ekonomis total belanja daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai ekonomis pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya dan memiliki selisih sebesar 9,60%. Pada tahun 2021 juga nilai ekonomis yang sangat tinggi sebesar 90,15% hampir mencapai nilai seimbang ekonomis.

Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pengeluaran belanja yang digunakan untuk memenuhi program pemerintah. Sebagian besar penyebab dari tingginya nilai ekonomis tersebut karena pada tahun 2021 adalah menghadapi masa pandemi. Pengeluaran cukup besar untuk memenuhi program pemerintah untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana Covid-19 dan pada masa itu banyak pegawai yang kerja dari rumah. Sedangkan biaya untuk bekerja atau tunjangan pada masa itu cukup besar.

Ketika ditarik kesimpulan dari analisis di atas diketahui bahwa nilai tingkat ekonomis yang paling tinggi adalah tahun

2021 yang sebesar 90,15%. Sedangkan nilai ekonomis yang paling kecil pada tahun 2018 yaitu sebesar 80,52%. Seperti yang dijelaskan sebelumnya nilai yang paling kecil persentasinya itu yang paling ekonomis. Berarti dari data yang dikelola mengenai belanja daerah Kota Bukittinggi yang paling ekonomis terjadi pada tahun 2018.

b. Perhitungan Efisiensi

Berdasarkan data yang dikelola untuk menghitung tingkat efisiensi dari belanja daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2017 tingkat efisiensinya sebesar 5,86% pada tahun 2018 sebesar 4,24% pada tahun 2019 sebesar 5,36% pada tahun 2020 sebesar 4,34% dan pada tahun 2021 sebesar 9,81%.

Dari perhitungan tersebut nilai untuk tingkat efisiensi belanja daerah Kota Bukittinggi sangat kecil yang mana berarti pemerintahan Kota Bukittinggi dalam menggunakan anggaran belanja daerah sudah efisien dan berhemat. Tetapi ada tahun 2021 tingkat efisiensinya meningkat cukup besar yaitu sebesar 5,47%. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya dana yang digunakan untuk belanja daerah pada tahun 2021 tersebut.

Nilai terkecil dari perhitungan efisiensi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,24%. Sedangkan yang paling tertinggi pada tahun 2021 sebesar 9,81%. Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2021 sudah efisien. Tetapi pada tahun 2018 belanja daerah sangat efisien yang nilai tingkat efisiensinya sebesar 4,24%.

Efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi telah sesuai dengan perintah Allah kepada umatnya untuk bersifat hemat. Adapun ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang perilaku hemat adalah Surah Al-Isra ayat 26 dan 27.

Surah Al-Isra ayat 26

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : *"Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan,dan janganlah menghambur hamburkan (hartamu) secara boros."*

Surah Al-Isra ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : *"Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan-setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah ingkar."*

c. Perhitungan Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas pada tahun 2017 sebesar 794,58%, pada tahun 2018 sebesar 637,48%, pada tahun 2019 sebesar 740,14%, pada tahun 2020 sebesar 638,21%, dan pada tahun 2021 1.126,15%.

Nilai terkecil pada tingkat efektivitas terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 637,48%. Sedangkan nilai yang tertnggiterjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.126,15%. Ketika ditarik kesimpulan hasil dari tingkat efektivitas belanja daerah

Kota Bukittinggi yang mengalami tingkat efektif yang baik pada tahun 2021 yaitu nilai efektivitasnya sebesar 1.126,15%. Pada tingkat efektivitas semakin tinggi semakin efektif. Tetapi keika dilihat dari macam-macam belanja daerah yang paling efektif itu pada belanja tidak terduga pada tahun 2019 yaitu memiliki nilai efektivitasnya sebesar 27.837%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan belanja daerah dari tahun 2017 sampai 2021 sudah ekonomis. Pada tahun 2018 tingkat ekonomi yang paling rendah yaitu sebesar 80,52% dan dapat diartikan pada tahun 2018 pula paling ekonomis diantara tahun 2018,2018,2019,2020, dan 2021. Akan tetapi pada tahun 2021 nilai ekonomis meningkat cukup besar dan dapat dikatakan seimbang ekonomis yang memiliki nilai tingkat ekonomis sebesar 90,15%.
2. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belanja daerah Kota Bukittinggi sudah efisien, dan dapat dikatakan sangat efisien hal ini dikarenakan nilai dari tingkat efisiensi dibawah 10%. Pada 2018 tingkat efisiensi belanja daerah Kota Bukittinggi dapat dikatakan sangat efisien karena nilai tingkat efisiensinya sangat rendah yaitu sebesar 4,24%. Pada tahun 2021 tingkat efisien meningkat sebesar 9,81% dan memiliki selisih sebesar 5,47% dari tahun sebelumnya.
3. Belanja daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sudah efektif. Hal ini dikarenakan nilai efektivitasnya melebihi 100% yang mana semakin tinggi nilai efektivitasnya semakin efektif belanja daerah tersebut. Pada tahun 2021 merupakan tahun yang paling efektif yang memiliki nilai efektivitas sebesar 1.126,5% Tetapi ketika dilihat dari sisi macam-macam belanja daerah belanja tidak terduga pada tahun 2019 paling efektif yang

dimana nilai efektivitasnya paling tinggi dari semua nilai efektivitas yaitu sebesar 27.837,90%.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa perealisasian belanja daerah, dengan menggunakan lebih teliti dan lebih rinci serta dapat menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan waktu penelitian sehingga hasil penelitiannya lebih andal dan akurat dari pada penelitian ini.

2. Bagi Badan Keuangan

   Belanja daerah Kota Bukittinggi jika dihitung menggunakan metode *value for money* sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Tetapi masih mengalami naik turun, sebaiknya untuk penyusunan anggaran selanjutnya sebaiknya disusun sesuai kebutuhan sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Untuk efisien belnja daerah lebih baik ditingkatkan dikarenakan nilai efisiensinya masih terlalu kecil. Kemudian untuk belanja tidak terduga sebaiknya digunakan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan anggaran daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Febri, Ramadani Rani. 2016. *Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda*. Ejurnal. Untag-smd.ac.id.

Fridolin, Honga Ardon, Dkk. 2014. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung* . Jurnal Emba, Vol. 2 No. 4

Gare, Melchior Eugenndori. 2017. *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money Studi Kasus Pada Klinik Adhiwarga PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Halim, Abdul . 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

Haw, Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. PT Raja* Grafindo Persada. Jakarta.

Indrayani & Khairunnisa. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Junal Akuntansi dan Keuangan ISSN 2301-4717*. Vol. 6, No,1

Irgi, Gilang Saputra. 2021. *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset*

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mahsun, Moh. 2007. *Akuntansi Sektor Publik,* Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Mahsun, Moh. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Mubarok, Abdullah, Dkk. 2019. *Manajemen Keuangan; Aplikasi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Expert. Yogyakarta.

Nasution. 2003. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah.* Jakarta; PT. Bumi Aksara

Peratuan Pemerintah No.58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Riduwan. 2004. *Metodologi Riset*. Jakarta: Rineka Cipta

Rodin, Rhono. 2017. *Teknologi Informasi dan Fungsi Kepustakawan; Pemikiran Tentang Perpustkaan Dan Kepustakawan Indonesia*. Calpulis. Yogyakarta.

Setiawan, A.B, A. Zamaludin, dkk. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Satuan Kerja Balai Penelitian Tanaman Hias Kabupaten Cianjur. *Jurnal Akunida ISSN 2442—3033*. Vol. 6, No.2

Sirait, Pirmatua. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 2 cetakan 1. Expert. Yogyakarta.

Syafri, Harahap Sofyan, 2004. *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.

Tim Redaksi Fokusmedia, Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah. Cetakan pertaman, (Bandung: Fokusmedia, 2008)

Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan disestralisasi fiskal

Undang- undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016, Edisi Pertama. Cet. Ke-1. (Yogyakarta: Manuscript)

Wiratna, Sujarweni V. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik.* Pustaka Baru press. Yogyakarta.